BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Hamahera Barat.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,Kabupaten Halmahera Timur,dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang- undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Reublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat .
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor .... tahun ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor..... Tahun ..... tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

4. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Halmahera Barat;

6. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

8. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Kepala Desa dan perangkat.

11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure Penyelenggara Pemerintahan Desa.

12. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

13. Badan PermusyawaratanDesa yang selanjutnya disebut BPD adalahlembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

14. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

15. Keputusan Desaadalah Keputusan Kepala Desa yang berkedudukan hokum dibawah Peraturan Desa bersifat mengatur dalam pelaksanaan Peraturan Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa yang bersumber dari bagian perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

PEMBAGIAN, PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN

Bagian Pertama

Pembagian

Pasal 2

Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 64.928.277.000 (enam puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar dibagi secara merata untuk setiap Desa sebesar Rp. 61.681.863.150,- (enam puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah).

b. Alokasi formula sebesar Rp. 3.246.413.850,- (tiga milyar dua ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan

keterjangkauan yang bersumber dari data kementerian/lembaga yang menangani urusan pemerintah di bidang statistik, dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Penghitungan

Pasal 3

Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap desa sebagai berikut :

1). Rumus Penetapan ADD:

$$\sum \text{ADD} = \sum(\text{ADDM} + \text{ADDP.})$$

ADDx = Alokasi Dana Desa x
ADDM. = Alokasi Dana Desa Minimal (perolehan Desa sama) sebesar 95%.
ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (berdasarkan koefisiensi variabel-variabel sebesar 5%).

2). Formula penerimaan ADD kepada Desa :

$$\text{ADD} = (\text{ADDM} + \text{BDx}\ (\text{ADDP.})$$

BDx adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3). Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$\text{BDx} = a1\ KV1 + a2KV2 + a3\ KV3 + a4\ KV4$$

a1, a2, a3, a4 :adalah angka bobot masing-masing variabel
KV1, KV2, KV3, KV4 :adalah koefisien masing-masing variabel.

a. Rumus koefisien Variabel Desa x

1) KV Kemiskinan

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kab}}$$

2) KV JumlahPenduduk

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa seKab.}}$$

3). KV. Luas Wilayah Desa

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa seKab}}$$

4). KV Keterjangkauan Desa

Jarak Desa keKab

Jumlah Jarak Desa keKab.

b. Penetapan Variabel Dan BobotVariabel

Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot
a. Jumlah Penduduk	V2	a2	0,10
a. Kemiskinan	V1	a1	0,50
b. Luas Wilayah	V3	a3	0,15
c. Keterjangkauan Desa	V4	a4	0,25
Jumlah			1

d. Data Variabel

1) Data Kemisikinan adalah jumlah Penduduk miskin di Desa bersumber dari masing-masing Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik (Data ini mewakili kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan) dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Halmahera Barat / Kecamatan.
2) Data JumlahPenduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari data Kecamatan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistik/ Dinas DUKCapil Kabupaten Halmahera Barat.
3) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan/Data Kementerian / lembaga yang menangani urusan pemerintah dibidang statistikdata BPS/Kabupaten/Kecamatan.
4) Data Keterjangkauan Desa adalahJarak Desa keKabupaten berdasarkan data Kecamatan.

Bagian Ketiga

Penetapan Rincian

Pasal 4

Penghitungan dan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

Penutup

Pasal 5

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 16 Januari 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pem & Kesra	
Kepala BPKAD	
Kepala DPMPD	
Kabag.Hukum & Organisasi	

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 16 Januari 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Drs. Julius Marau, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M.
Pembina IV/a
Nip. 19730128 2006 04 1 009

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 JANUARI 2025
TENTANG : PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Total ADD 2025/ Desa	Nilai ADD Pembulatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)	
1	Jailolo	Gufasa	356.542.561,561	11.544.351	368.086.913	**368.087.000**
2	Jailolo	Guaimaadu	356.542.561,561	16.551.219	373.093.781	**373.094.000**
3	Jailolo	Jalan Baru	356.542.561,561	30.257.048	386.799.610	**386.800.000**
4	Jailolo	Gam Lamo	356.542.561,561	18.578.537	375.121.099	**375.121.000**
5	Jailolo	Soakonora	356.542.561,561	20.555.454	377.098.015	**377.098.000**
6	Jailolo	Galala	356.542.561,561	18.061.343	374.603.905	**374.604.000**
7	Jailolo	Bobanehena	356.542.561,561	19.733.158	376.275.720	**376.276.000**
8	Jailolo	Payo	356.542.561,561	12.581.383	369.123.945	**369.124.000**
9	Jailolo	Bobo	356.542.561,561	16.768.172	373.310.734	**373.311.000**
10	Jailolo	Saria	356.542.561,561	9.195.791	365.738.353	**365.738.000**
11	Jailolo	Idam Dehe	356.542.561,561	8.379.170	364.921.732	**364.922.000**
12	Jailolo	Idamdehe Gamsungi	356.542.561,561	8.755.885	365.298.447	**365.298.000**
13	Jailolo	Marmabati	356.542.561,561	11.112.405	367.654.967	**367.655.000**
14	Jailolo	Gamtala	356.542.561,561	11.185.361	367.727.922	**367.728.000**
15	Jailolo	Lolory	356.542.561,561	11.865.541	368.408.103	**368.408.000**
16	Jailolo	Toboso	356.542.561,561	10.380.533	366.923.095	**366.923.000**
17	Jailolo	Huku-Huku Kie	356.542.561,561	15.208.249	371.750.810	**371.751.000**
18	Jailolo	Acango	356.542.561,561	12.502.542	369.045.103	**369.045.000**
19	Jailolo	Tedeng	356.542.561,561	37.573.928	394.116.489	**394.116.000**
20	Jailolo	Akediri	356.542.561,561	25.539.451	382.082.013	**382.082.000**
21	Jailolo	Pornity	356.542.561,561	21.502.323	378.044.885	**378.045.000**
22	Jailolo	Buku Matiti	356.542.561,561	23.912.281	380.454.843	**380.455.000**
23	Jailolo	Todowongi	356.542.561,561	19.370.656	375.913.218	**375.913.000**
24	Jailolo	Tuada	356.542.561,561	14.830.493	371.373.055	**371.373.000**
25	Jailolo	Matui	356.542.561,561	10.455.312	366.997.874	**366.998.000**
26	Jailolo	Buku Bualawa	356.542.561,561	12.945.976	369.488.538	**369.489.000**
27	Jailolo	Tauro	356.542.561,561	26.456.572	382.999.133	**382.999.000**
28	Jailolo	Hate Bicara	356.542.561,561	11.888.984	368.431.545	**368.432.000**
29	Jailolo	Guaeria	356.542.561,561	12.795.109	369.337.671	**369.338.000**
30	Jailolo	Pateng	356.542.561,561	14.491.140	371.033.701	**371.034.000**
31	Jailolo	Bobo Jiko	356.542.561,561	7.672.765	364.215.327	**364.215.000**
32	Jailolo	Ulo	356.542.561,561	9.512.472	366.055.033	**366.055.000**
33	Jailolo	Kuripasai	356.542.561,561	12.888.600	369.431.161	**369.431.000**
34	Jailolo	Buku Maadu	356.542.561,561	9.538.299	366.080.860	**366.081.000**
35	Loloda	Kedi	356.542.561,561	27.186.930	383.729.491	**383.729.000**
36	Loloda	Soasio	356.542.561,561	20.746.544	377.289.106	**377.289.000**
37	Loloda	Totala	356.542.561,561	22.145.729	378.688.290	**378.688.000**
38	Loloda	Tolofuo	356.542.561,561	16.410.896	372.953.457	**372.953.000**
39	Loloda	Tuguis	356.542.561,561	24.555.278	381.097.840	**381.098.000**
40	Loloda	Tasye	356.542.561,561	62.240.630	418.783.191	**418.783.000**
41	Loloda	Laba Besar	356.542.561,561	25.295.050	381.837.611	**381.838.000**
42	Loloda	Laba Kecil	356.542.561,561	16.085.088	372.627.650	**372.628.000**
43	Loloda	Bakun	356.542.561,561	15.822.202	372.364.764	**372.365.000**
44	Loloda	Buo	356.542.561,561	37.811.475	394.354.037	**394.354.000**
45	Loloda	Kahatola	356.542.561,561	25.491.050	382.033.612	**382.034.000**
46	Loloda	Bosala	356.542.561,561	25.345.109	381.887.671	**381.888.000**
47	Loloda	Salu	356.542.561,561	28.902.160	385.444.722	**385.445.000**
48	Loloda	Bantoli	356.542.561,561	24.464.314	381.006.876	**381.007.000**
49	Loloda	Linggua	356.542.561,561	24.005.446	380.548.008	**380.548.000**
50	Loloda	Tomodo	356.542.561,561	28.174.342	384.716.904	**384.717.000**
51	Loloda	Totala Jaya	356.542.561,561	14.681.726	371.224.288	**371.224.000**
52	Loloda Tengah	Jano	356.542.561,561	11.970.956	368.513.517	**368.514.000**
53	Loloda Tengah	Bakun Pante	356.542.561,561	18.845.560	375.388.122	**375.388.000**
54	Loloda Tengah	Barataku	356.542.561,561	32.206.896	388.749.458	**388.749.000**
55	Loloda Tengah	Gam Kahe	356.542.561,561	24.482.393	381.024.955	**381.025.000**
56	Loloda Tengah	Pumadada	356.542.561,561	59.745.957	416.288.518	**416.289.000**
57	Loloda Tengah	Baja	356.542.561,561	17.513.619	374.056.181	**374.056.000**
58	Loloda Tengah	Tosomolo	356.542.561,561	14.524.286	371.066.847	**371.067.000**
59	Loloda Tengah	Jangailulu	356.542.561,561	11.991.504	368.534.066	**368.534.000**
60	Loloda Tengah	Bilote	356.542.561,561	16.941.319	373.483.881	**373.484.000**
61	Loloda Tengah	Aruku	356.542.561,561	15.023.950	371.566.512	**371.567.000**
62	Ibu	Togola Wayoli	356.542.561,561	15.853.711	372.396.273	**372.396.000**
63	Ibu	Togola Sangir	356.542.561,561	23.266.442	379.809.003	**379.809.000**
64	Ibu	Tahafo	356.542.561,561	15.807.451	372.350.013	**372.350.000**
65	Ibu	Tongute Ternate	356.542.561,561	30.657.652	387.200.214	**387.200.000**
66	Ibu	Akesibu	356.542.561,561	19.269.198	375.811.759	**375.812.000**
67	Ibu	Maritango	356.542.561,561	16.343.443	372.886.004	**372.886.000**

68	Ibu	Kie Ici	356.542.561,561	29.208.784	385.751.346	**385.751.000**
69	Ibu	Tongute Goin	356.542.561,561	25.976.442	382.519.003	**382.519.000**
70	Ibu	Tungute Sungi	356.542.561,561	15.856.943	372.399.505	**372.400.000**
71	Ibu	Gam Ici	356.542.561,561	22.489.269	379.031.831	**379.032.000**
72	Ibu	Tobaol	356.542.561,561	20.223.220	376.765.781	**376.766.000**
73	Ibu	Gamlamo	356.542.561,561	20.127.724	376.670.286	**376.670.000**
74	Ibu	Naga	356.542.561,561	19.172.843	375.715.404	**375.715.000**
75	Ibu	Soana Masungi	356.542.561,561	16.994.108	373.536.669	**373.537.000**
76	Ibu	Tongute Ternate Asal	356.542.561,561	12.276.426	368.818.988	**368.819.000**
77	Ibu	Ake Boso	356.542.561,561	15.230.756	371.773.317	**371.773.000**
78	Ibu	Kampung Baru	356.542.561,561	13.524.657	370.067.219	**370.067.000**
79	Sahu	Susupu	356.542.561,561	14.240.361	370.782.923	**370.781.000**
80	Sahu	Lako Akelamo	356.542.561,561	7.102.666	363.645.228	**363.645.000**
81	Sahu	Taruba	356.542.561,561	7.746.126	364.288.687	**364.289.000**
82	Sahu	Todahe	356.542.561,561	9.947.798	366.490.360	**366.490.000**
83	Sahu	Peot	356.542.561,561	15.619.214	372.161.775	**372.162.000**
84	Sahu	Sasur	356.542.561,561	26.257.089	382.799.651	**382.800.000**
85	Sahu	Goro goro	356.542.561,561	18.955.534	375.498.096	**375.498.000**
86	Sahu	Tacim	356.542.561,561	9.489.444	366.032.006	**366.032.000**
87	Sahu	Balisoang	356.542.561,561	11.157.309	367.699.870	**367.700.000**
88	Sahu	Worat-worat	356.542.561,561	6.388.534	362.931.096	**362.931.000**
89	Sahu	Tacici	356.542.561,561	5.445.457	361.988.019	**361.988.000**
90	Sahu	Taraudu	356.542.561,561	6.996.220	363.538.781	**363.539.000**
91	Sahu	Golo	356.542.561,561	7.666.324	364.208.886	**364.209.000**
92	Sahu	Lako Akederi	356.542.561,561	8.067.193	364.609.755	**364.610.000**
93	Sahu	Jara Kore	356.542.561,561	9.151.324	365.693.886	**365.694.000**
94	Sahu	Ropu Tengah Balu	356.542.561,561	15.549.761	372.092.322	**372.092.000**
95	Sahu	Dere	356.542.561,561	11.592.024	368.134.586	**368.135.000**
96	Sahu	Balisoan Utara	356.542.561,561	10.946.471	367.489.033	**367.489.000**
97	Sahu	Sasur Pantai	356.542.561,561	9.390.330	365.932.891	**365.933.000**
98	Jailolo Selatan	Sidangoli Gam	356.542.561,561	42.625.863	399.168.425	**399.168.000**
99	Jailolo Selatan	Sidongoli Dehe	356.542.561,561	31.499.819	388.042.381	**388.042.000**
100	Jailolo Selatan	Domato	356.542.561,561	20.835.781	377.378.342	**377.378.000**
101	Jailolo Selatan	Tataleka	356.542.561,561	16.925.994	373.468.556	**373.469.000**
102	Jailolo Selatan	Gamlenge	356.542.561,561	13.972.458	370.515.020	**370.515.000**
103	Jailolo Selatan	Akejailolo	356.542.561,561	12.096.431	368.638.993	**368.639.000**
104	Jailolo Selatan	Biamaahi	356.542.561,561	17.072.666	373.615.228	**373.615.000**
105	Jailolo Selatan	Tuguraci	356.542.561,561	15.419.278	371.961.840	**371.962.000**
106	Jailolo Selatan	Akeara	356.542.561,561	48.039.074	404.581.635	**404.582.000**
107	Jailolo Selatan	Akelaha	356.542.561,561	17.998.179	374.540.741	**374.541.000**
108	Jailolo Selatan	Dodinga	356.542.561,561	28.642.941	385.185.503	**385.186.000**
109	Jailolo Selatan	Tewe	356.542.561,561	16.973.198	373.515.759	**373.516.000**
110	Jailolo Selatan	Toniku	356.542.561,561	25.795.054	382.337.615	**382.338.000**
111	Jailolo Selatan	Rioribati	356.542.561,561	20.441.103	376.983.664	**376.984.000**
112	Jailolo Selatan	Taba Damai (DB)	356.542.561,561	22.707.033	379.249.595	**379.250.000**
113	Jailolo Selatan	Moiso	356.542.561,561	13.397.362	369.939.924	**369.940.000**
114	Jailolo Selatan	Braha	356.542.561,561	19.943.918	376.486.480	**376.486.000**
115	Jailolo Selatan	Bangkit Rahmat	356.542.561,561	14.307.954	370.850.516	**370.851.000**
116	Jailolo Selatan	Bobane Dano	356.542.561,561	8.420.491	364.963.052	**364.963.000**
117	Jailolo Selatan	Suka Damai	356.542.561,561	14.744.699	371.287.261	**371.287.000**
118	Jailolo Selatan	Hijrah	356.542.561,561	15.959.656	372.502.218	**372.502.000**
119	Jailolo Selatan	Ratem	356.542.561,561	6.498.864	363.041.426	**363.041.000**
120	Jailolo Selatan	Bobaneigo Madihutu	356.542.561,561	30.374.758	386.917.320	**386.917.000**
121	Jailolo Selatan	Akelamo Cinga-cinga	356.542.561,561	25.560.927	382.103.489	**382.103.000**
122	Jailolo Selatan	Akesahu Madutu	356.542.561,561	22.310.690	378.853.252	**378.853.000**
123	Jailolo Selatan	Tetewang Joronga	356.542.561,561	13.584.683	370.127.244	**370.127.000**
124	Tabaru	Podol	356.542.561,561	31.124.475	387.667.036	**387.667.000**
125	Tabaru	Tengowango	356.542.561,561	13.086.707	369.629.269	**369.629.000**
126	Tabaru	Togowo	356.542.561,561	57.316.149	413.858.711	**413.859.000**
127	Tabaru	Duono	356.542.561,561	29.920.858	386.463.420	**386.463.000**
128	Tabaru	Goin	356.542.561,561	18.740.350	375.282.911	**375.283.000**
129	Tabaru	Sangaji Nyeku	356.542.561,561	17.719.073	374.261.634	**374.262.000**
130	Tabaru	Tuguis	356.542.561,561	14.470.178	371.012.740	**371.013.000**
131	Tabaru	Togoreba Sungi	356.542.561,561	20.792.210	377.334.772	**377.335.000**
132	Tabaru	Barona	356.542.561,561	45.948.285	402.490.846	**402.491.000**
133	Tabaru	Todoke	356.542.561,561	13.632.786	370.175.347	**370.175.000**
134	Tabaru	Tolisaor	356.542.561,561	20.717.351	377.259.913	**377.260.000**
135	Tabaru	Pasalulu	356.542.561,561	20.426.785	376.969.346	**376.969.000**
136	Tabaru	Togoreba Tua	356.542.561,561	25.879.931	382.422.493	**382.422.000**
137	Tabaru	Tukuoku	356.542.561,561	19.113.325	375.655.886	**375.656.000**
138	Tabaru	Soasangaji	356.542.561,561	8.623.500	365.166.061	**365.166.000**
139	Tabaru	Aru Jaya	356.542.561,561	18.554.471	375.097.032	**375.097.000**
140	Ibu Selatan	Tosoa	356.542.561,561	20.652.646	377.195.208	**377.195.000**
141	Ibu Selatan	Tobobol	356.542.561,561	24.199.893	380.742.454	**380.742.000**
142	Ibu Selatan	Baru	356.542.561,561	41.301.970	397.844.532	**397.845.000**
143	Ibu Selatan	Nanas	356.542.561,561	16.135.339	372.677.901	**372.678.000**
144	Ibu Selatan	Jere	356.542.561,561	20.277.217	376.819.778	**376.820.000**
145	Ibu Selatan	Gamsungi	356.542.561,561	17.440.515	373.983.076	**373.983.000**
146	Ibu Selatan	Bataka	356.542.561,561	36.964.614	393.507.176	**393.507.000**

147	Ibu Selatan	Talaga	356.542.561,561	31.013.306	387.555.867	**387.556.000**
148	Ibu Selatan	Tobelos	356.542.561,561	13.129.327	369.671.889	**369.672.000**
149	Ibu Selatan	Gamkonora	356.542.561,561	22.753.891	379.296.453	**379.296.000**
150	Ibu Selatan	Sarau	356.542.561,561	27.253.115	383.795.676	**383.796.000**
151	Ibu Selatan	Ngawet	356.542.561,561	27.876.538	384.419.100	**384.419.000**
152	Ibu Selatan	Adu	356.542.561,561	19.580.341	376.122.903	**376.123.000**
153	Ibu Selatan	Gamsida	356.542.561,561	25.988.403	382.530.965	**382.531.000**
154	Ibu Selatan	Ngalo Ngalo	356.542.561,561	15.613.140	372.155.702	**372.156.000**
155	Ibu Selatan	Tuguaer	356.542.561,561	22.096.208	378.638.770	**378.639.000**
156	Sahu Timur	Loce	356.542.561,561	16.021.618	372.564.179	**372.564.000**
157	Sahu Timur	Idam Gamlamo	356.542.561,561	9.772.896	366.315.458	**366.315.000**
158	Sahu Timur	Gamomeng	356.542.561,561	11.351.271	367.893.833	**367.894.000**
159	Sahu Timur	Akelamo	356.542.561,561	15.988.070	372.530.632	**372.531.000**
160	Sahu Timur	Taraudu Kusu	356.542.561,561	7.327.226	363.869.787	**363.870.000**
161	Sahu Timur	Awer	356.542.561,561	12.480.850	369.023.412	**369.023.000**
162	Sahu Timur	Aketola	356.542.561,561	13.052.600	369.595.161	**369.595.000**
163	Sahu Timur	Tibobo	356.542.561,561	11.422.014	367.964.576	**367.965.000**
164	Sahu Timur	Hoku- hoku Gam	356.542.561,561	8.232.798	364.775.360	**364.775.000**
165	Sahu Timur	Gamnyial	356.542.561,561	8.917.149	365.459.711	**365.460.000**
166	Sahu Timur	Golago Kusuma	356.542.561,561	9.571.576	366.114.137	**366.114.000**
167	Sahu Timur	Ngaon	356.542.561,561	6.483.405	363.025.966	**363.026.000**
168	Sahu Timur	Gamsungi	356.542.561,561	6.278.413	362.820.974	**362.821.000**
169	Sahu Timur	Taba Campaka	356.542.561,561	9.488.630	366.031.191	**366.031.000**
170	Sahu Timur	Campaka	356.542.561,561	11.777.762	368.320.324	**368.320.000**
171	Sahu Timur	Goal	356.542.561,561	19.854.292	376.396.854	**376.397.000**
172	Sahu Timur	Sidodadi	356.542.561,561	18.300.489	374.843.051	**374.843.000**
173	Sahu Timur	Air Panas	356.542.561,561	14.411.849	370.954.411	**370.954.000**
	Jumlah		**61.681.863.150**	**3.246.413.850**	**64.928.277.000**	**64.928.277.000**

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Assisten Bid Pem dan Kesra	
Kepala DPMPD	
Kepala BKAD	
Kabag Hukum dan Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG

Diundangkan Di Jailolo
Pada Tanggal 16 Januari 2025

PJ. SERETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DRS. JULIUS MARAU, M.Si

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024 Nomor

Salinan sesuaidengan aslinya,
Kabag. Hukum & Organisasi Setda Kab. Halmahera Barat

Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2025 Nomor 5

Jason Kalopas Lalomo, S.H., LL.M
Pembina IV/a
Nip. 19730128 2006 04 1 009